

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 43

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 08 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluais dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Kedudukan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
38. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

-
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
 45. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
 46. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp 1.547.880.776.557,02 bertambah sejumlah Rp 25.104.440.936,72 sehingga menjadi Rp 1.572.985.217.493,74 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula	Rp	1.444.961.743.578,02	
b. Bertambah/berkurang	Rp	22.249.519.047,72	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp		Rp 1.467.211.262.625,74

2. Belanja :

a. Semula	Rp	1.519.451.394.855,02	
b. Bertambah/berkurang	Rp	28.109.792.638,72	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 1.547.561.187.493,74
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (80.349.924.868,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp	102.919.032.979,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.854.921.889,00		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp	105.773.954.868,00

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp	28.429.381.702,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(3.005.351.702,00)		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp	24.424.030.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp	80.349.924.868,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Semula	Rp	108.385.766.587,02		
2) Bertambah/berkurang	Rp	8.430.323.866,00		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	116.816.090.453,02

b. Dana Perimbangan :

1) Semula	Rp	1.087.244.449.897,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	3.044.723,548,00		
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp	1.087.289.173.445,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah :

1) Semula	Rp	252.331.527.094,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	10.744.471.633,72		
Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan			Rp	263.105.998.727,72

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

1) Semula	Rp	22.661.559.379,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.300.000.000,00		
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp	23.961.559.379,00

b. Retribusi Daerah :

1) Semula	Rp	20.365.066.088,55		
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.114.172.070,00		
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan			Rp	21.479.238.158,55

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp	7.843.587.367,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	633.408.871,00		
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp	8.476.996.238,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

1) Semula	Rp	57.515.553.752,47		
2) Bertambah/berkurang	Rp	5.382.742.925,00		
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp	62.898.296.677,47

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil :

1) Semula	Rp	104.980.130.897,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	3.044.723.548,00

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 108.024.854.445,00

b. Dana alokasi umum :

1) Semula	Rp	877.993.919.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp 877.993.919.000,00

c. Dana alokasi khusus :

1) Semula	Rp	101.270.400.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp 101.270.400.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah :

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00

b. Dana darurat :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak :			
1) Semula	Rp	38.146.367.136,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	3.658.777.633,72	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 41.805.144.769,72
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus :			
1) Semula	Rp	120.577.274.958,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan dana penyesuaian dan otonomi daerah setelah perubahan			Rp 120.577.274.958,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya :			
1) Semula	Rp	90.607.885.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	7.115.694.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah lain setelah perubahan			Rp 97.723.579.000,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :			
1) Semula	Rp	1.079.511.358.608,02	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(70.579.883.378,28)	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 1.008.931.475.229,74
b. Belanja Langsung :			
1) Semula	Rp	439.940.036.247,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	98.689.676.017,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 538.629.712.264,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :

1) Semula	Rp	842.021.777.400,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	(32.560.136.100,00)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 809.461.641.300,00

b. Belanja Bunga :

1) Semula	Rp	1.637.750.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	(221.300.000,00)

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 1.416.450.000,00

c. Belanja Subsidi :

1) Semula	Rp	4.372.006.500,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 4.372.006.500,00

d. Belanja Hibah :

1) Semula	Rp	105.126.979.200,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	(64.512.154.250,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 40.614.824.950,00

e. Belanja Bantuan Sosial :

1) Semula	Rp	63.015.667.500,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	14.232.950.000,00

Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp 77.248.617.500,00

f. Belanja Bagi Hasil :			
1) Semula	Rp	922.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	300.000.000,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 1.222.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan :			
1) Semula	Rp	57.276.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	11.088.920.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 68.364.920.000,00
h. Belanja Tidak Terduga :			
1) Semula	Rp	5.139.178.008,02	
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.091.836.971,72	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 6.231.014.979,74
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai :			
1) Semula	Rp	29.832.130.200,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(1.874.274.500,00)	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 27.957.855.700,00
b. Belanja Barang dan Jasa :			
1) Semula	Rp	205.510.733.947,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	15.182.432.176,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 220.693.166.123,00
c. Belanja Modal :			
1) Semula	Rp	204.597.172.100,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	88.381.518.341,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 289.978.690.441,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula	Rp	102.919.032.979,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.854.921.889,00

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 105.773.954.868,00

b. Pengeluaran :

1) Semula	Rp	28.429.381.702,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	(3.005.351.702,00)

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 25.424.030.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) :

1) Semula	Rp	102.919.032.979,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	2.854.921.889,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp 105.773.954.868,00

b. Pencairan dana cadangan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah :				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp		0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan				Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp		0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan				Rp 0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah :				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp		0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan				Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :				
a. Pembentukan Dana Cadangan :				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	877.530.000,00		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan				Rp 877.530.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah :				
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp		0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah setelah perubahan				Rp 0,00

c. Pembayaran pokok utang :

1) Semula	Rp	28.429.381.702,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	(3.882.881.702,00)	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			Rp 24.546.500.000,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah :

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselerasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- Lampiran VII : Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 43 SERI D.

NOMOR URUT	U R A I A N			JUMLAH		Bertambah/(berkurang)	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2			3	4	5	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3	1	Penerimaan pembiayaan					
3	1	1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	102,919,032,979.00	105,773,954,868.00	2,854,921,889.00	2.77
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	6	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
			Jumlah penerimaan pembiayaan	102,919,032,979.00	105,773,954,868.00	2,854,921,889.00	2.77
3	2	Pengeluaran pembiayaan					
3	2	1	Pembentukan dana cadangan	0.00	877,530,000.00	877,530,000.00	0.00
3	2	2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2	3	Pembayaran pokok utang	28,429,381,702.00	24,546,500,000.00	(3,882,881,702.00)	(13.66)
3	2	4	Pemberian pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
			Jumlah pengeluaran pembiayaan	28,429,381,702.00	25,424,030,000.00	(3,005,351,702.00)	(10.57)
			Pembiayaan neto	74,489,651,277.00	80,349,924,868.00	5,860,273,591.00	7.87
3	3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		0.00	0.00	0.00	0.00

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								pokok Pinjaman Daerah	Bunga	pokok Pinjaman Daerah	Bunga
								(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dep.Keu.RI (ADB.LA No. 1384.1ND)		Surat Perjanjian Pinjaman No. SLA - 964/DP-3 /1997	1,488,493,189.14	1997 - 2011	11,75 % per Tahun	Pembiayaan West Java Urban Development Project (WJUDP)	296,423,650.41	44,214,469.23	0.00	0.00
2	Bank Muamalat		Persetujuan Pemb. Wa'd al-murabahah No. 103/OL1/BMI-CJR/XII/2008	40,016,473,250.00	2 Tahun 2009/2010	13.5%	Pembiayaan untuk Infrastruktur Jalan & Jembatan	21,349,239,800.00	1,593,173,490.00	0.00	0.00
JUMLAH				41,504,966,439.14				21,645,663,450.41	1,637,387,959.23	0.00	0.00

Dibundangkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 SEKRETARIS DAERAH,

 MASKANA SUMITRA
 NIP. 1951034 198503 1004

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 BUPATI CIANJUR


Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 SEKRETARIS DAERAH,

 MASKANA SUMITRA
 NIP. 19571013-198503 1004

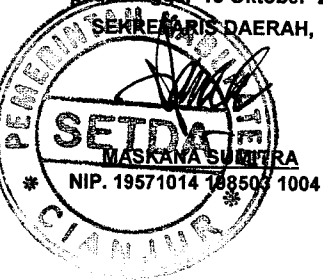
Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2008 (Rp)	Jumlah Anggaran TA 2009 (Rp)		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2009 (Rp)	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini TA 2010 (Rp)	
		APBD INDUK TA 2008	Perubahan APBD TA 2008		APBD INDUK TA 2009	Perubahan APBD TA 2009		INDUK	PERUBAHAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bansos				2,481,750,000.00	2,481,750,000.00	0.00	12,689,377,600.00	0.00
	Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga							18,216,858,937.00	
	Tambahan Penghasilan P Dan K							26,976,975,000.00	
	JUMLAH	0.00	0.00	0.00	71,874,169,605.00	74,086,679,220.00	0.00	93,679,032,979.00	0.00

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2009		Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2009	ini (Rp) TA 2010	
		APBD TA 2009	Perubahan APBD TA 2009		APBD	Perubahan APBD
2	3	4	5	6	7	8
	Bansos	2,481,750,000.00	2,481,750,000.00	0.00	12,689,377,600.00	0.00
	Pembayaran Hutang Pada Pihak Ketiga				18,216,858,937.00	
	Tambahan Penghasilan P Dan K				26,976,975,000.00	
	JUMLAH	71,874,169,605.00	74,086,679,220.00	0.00	93,679,032,979.00	0.00

Dijudangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETANIS DAERAH,



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 TAHUN 2010
TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
	JUMLAH	0.00	0.00	0.00	0.00

Ditandatangani di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
NIP. 19571014 198503 1004



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1 6 = 3 + 4 - 5
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	893,163,391,526.00	0.00	100,602,266,748.00	792,561,124,778.00
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan	169,361,593,943.00	34,620,339,983.00	0.00	203,981,933,926.00
3	Gedung dan Bangunan	718,456,698,026.00	167,243,778,228.00	0.00	885,700,476,254.00
4	Mesin dan Peralatan	729,304,901,187.00	76,769,704,084.00	0.00	806,074,605,271.00
5	Aset Tetap Lainnya	38,375,163,836.00	1,930,912,124.00	0.00	40,306,075,960.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	6,793,516,592.00	27,357,155,675.00	0.00	34,150,672,267.00
7	Aset Tetap rusak berat	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH		2,555,455,265,110.00	0.00	100,602,266,748.00	792,561,124,778.00

Ditandatangani di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 SEKRETARIS DAERAH,

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1		PDAM			7,556,274,365.13	7,556,274,365.13	0.00	7,556,274,365.13	0.00			7,556,274,365.13
2		BANK JABAR		SAHAM	23,604,190,000.00	23,604,190,000.00	0.00	23,604,190,000.00	0.00			23,604,190,000.00
3		BPR / LPK			13,079,700,043.00	13,079,700,043.00	0.00	13,079,700,043.00	0.00			13,079,700,043.00
JUMLAH					44,240,164,408.13	44,240,164,408.13	0.00	44,240,164,408.13	0.00	0.00	0.00	44,240,164,408.13

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 SEKRETARIS DAERAH,

 SETO
 MASKANA SUMITRA
 NIP. 19571014 198503 1004

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2010

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	7	0	0	0	2	4	13
Golongan IV/b	0	13	65	0	0	100	0	178
Golongan IV/a	0	0	44	29	0	5,198	4	5,275
JUMLAH GOLONGAN IV	0	21	109	29	0	5,300	8	5,467
Golongan III/d	0	0	46	332	0	1,710	32	2,120
Golongan III/c	0	0	1	123	0	891	74	1,089
Golongan III/b	0	0	0	49	0	777	558	1,384
Golongan III/a	0	0	0	1	0	552	564	1,117
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	47	505	0	3,930	1,228	5,710
Golongan II/d	0	0	0	0	0	280	379	659
Golongan II/c	0	0	0	0	0	233	388	621
Golongan II/b	0	0	0	0	0	193	390	583
Golongan II/a	0	0	0	0	0	111	651	762
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	817	1,808	2,625
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	86	86
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	49	49
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	136	136
TOTAL	0	21	156	534	0	10,047	3,180	13,938

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 SEKRETARIS DAERAH,



Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 BUPATI CIANJUR

.Cap/ttd,-

TJETJEP MUHTAR SOLEH

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
				JUMLAH (Rp)	%
	Lingkungan hidup	109,573,193,325.00	113,800,498,660.00	4,227,305,335.00	255.28
1 05	Penataan Ruang	107,757,023,945.00	107,340,918,580.00	(416,105,365.00)	(0.39)
1 08	Lingkungan Hidup	1,816,169,380.00	6,459,580,080.00	4,643,410,700.00	255.67
1 09	Pertanahan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perumahan dan fasilitas umum	81,897,995,362.00	81,825,606,812.00	(72,388,550.00)	(0.09)
1 03	Pekerjaan Umum	81,897,995,362.00	81,825,606,812.00	(72,388,550.00)	(0.09)
1 04	Perumahan Rakyat	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kesehatan	161,605,006,343.00	172,527,276,236.00	10,922,269,893.00	7.08
1 02	Kesehatan	149,539,883,843.00	160,492,140,236.00	10,952,256,393.00	7.32
1 12	Keluarga Berencana	12,065,122,500.00	12,035,136,000.00	(29,986,500.00)	(0.25)
	Pariwisata dan budaya	2,934,273,900.00	2,952,632,300.00	18,358,400.00	0.63
1 17	Kebudayaan	2,934,273,900.00	2,952,632,300.00	18,358,400.00	0.63
2 04	Pariwisata	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agama *)	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendidikan	679,494,134,600.00	724,987,769,900.00	45,493,635,300.00	6.70
1 01	Pendidikan	679,494,134,600.00	724,987,769,900.00	45,493,635,300.00	6.70
1 18	Kepemudaan dan Olah Raga	0.00	0.00	0.00	0.00
1 26	Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	0.00
	Perlindungan sosial	7,596,581,400.00	8,072,200,425.00	475,619,025.00	12.67
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	3,350,052,900.00	3,582,796,425.00	232,743,525.00	6.95
1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0.00	0.00	0.00	0.00
1 13	Sosial	4,246,528,500.00	4,489,404,000.00	242,875,500.00	5.72

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp.)	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
1	24										
1	24	01									
2											
2	01										
2	01	01									
2	02										
2	02	01									
2	04										
2	04	01									
2	05										
2	05	01									
2	07										
2	07	01									
Jumlah Urusan Wajib dan Pilihan											

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,

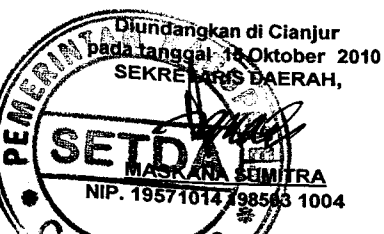


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUHTAR SOLEH

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		JENIS BELANJA			JUMLAH	JENIS BELANJA			JUMLAH	(Rp.)	%
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL			
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-6	12
	III										
	PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PILIHAN	249,575,000.00	892,156,600.00	27,600,000.00	1,169,331,600.00	280,250,000.00	1,340,706,000.00	218,300,000.00	1,839,256,000.00	669,924,400.00	57.29
01	15										
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	5,850,000.00	92,230,000.00	0.00	98,080,000.00	5,850,000.00	92,230,000.00	0.00	98,080,000.00	0.00	0.00
01	15	10									
	Pemasyarakatan, Pengawasan dan Pengujian Makanan/Minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan serta Pengawasan Sidang Tera Ulang Luar Kantor (STULKU)	5,850,000.00	92,230,000.00	0.00	98,080,000.00	5,850,000.00	92,230,000.00	0.00	98,080,000.00	0.00	0.00
01	18										
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	130,425,000.00	488,426,600.00	27,600,000.00	646,451,600.00	140,600,000.00	802,551,600.00	48,300,000.00	991,451,600.00	345,000,000.00	53.37
01	18	18									
	Pemantauan Perkembangan Harga, Pengadaan dan Penyaluran Kebutuhan Pokok, Barang Strategis dan Publikasi Komiditi Unggulan Kab. Cianjur	20,400,000.00	69,600,000.00	0.00	90,000,000.00	20,400,000.00	49,600,000.00	0.00	70,000,000.00	(20,000,000.00)	(22.22)
01	18	23									
	Sosialisasi, Implementasi dan Pendampingan Sistem Resi Gudang (SRG)	26,500,000.00	84,270,000.00	0.00	110,770,000.00	25,700,000.00	85,070,000.00	0.00	110,770,000.00	0.00	0.00
01	18	24									
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pasar Warungcondang dan Sukanagara	5,125,000.00	53,650,000.00	0.00	58,775,000.00	8,275,000.00	40,500,000.00	0.00	48,775,000.00	(10,000,000.00)	(17.01)
01	18	25									
	Pengadaan Sarana Pengendalian Kebakaran Pasar Bojongmeron, Pasar Induk, Ciaranjang, Cikalongkulon, Cibeber, Warungcondang, Cipanas	6,325,000.00	5,100,000.00	27,600,000.00	39,025,000.00	6,325,000.00	5,900,000.00	36,800,000.00	49,025,000.00	10,000,000.00	25.62
01	18	26									
	Penataan dan Registrasi Pemilik HPK serta Pengamanan dan Penempatan Kembali Warga Pedagang Cipanas	9,975,000.00	137,906,600.00	0.00	147,881,600.00	9,975,000.00	137,906,600.00	0.00	147,881,600.00	0.00	0.00
01	18	27									
	Fasilitasi Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penempatan kembali para Pedagang Pasar Cipanas	62,100,000.00	137,900,000.00	0.00	200,000,000.00	62,100,000.00	137,900,000.00	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00
01	18	28									
	Sosialisasi dan peningkatan Wawasan Tim Pengarah/Pengawas Pelaksanaan Pembangunan/Renovasi/Relokasi Pasar Kab. Cianjur	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	65,750,000.00	0.00	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
01	18	29									
	Penataan Pasar Cipanas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,000.00	279,925,000.00	11,500,000.00	295,000,000.00	295,000,000.00	0.00
01	15										
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	21,150,000.00	118,650,000.00	0.00	139,800,000.00	21,150,000.00	118,650,000.00	0.00	139,800,000.00	0.00	0.00
01	15	09									
	Penerapan TTG Pengolahan Pisang, Singkong dan arang Briket	21,150,000.00	118,650,000.00	0.00	139,800,000.00	21,150,000.00	118,650,000.00	0.00	139,800,000.00	0.00	0.00
01	16										
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	92,150,000.00	192,850,000.00	0.00	285,000,000.00	112,650,000.00	327,274,400.00	170,000,000.00	609,924,400.00	324,924,400.00	114.01
01	16	11-L									
	Peningkatan wawasan Pelaku Usaha Tembakau Iris Sigaret (TIS) (L-2009)	59,900,000.00	125,100,000.00	0.00	185,000,000.00	59,900,000.00	125,100,000.00	0.00	185,000,000.00	0.00	0.00
01	16	12									
	Pengembangan Wirausaha Baru di Pedesaan, Fasilitas HAKI IKM dan Bantuan Kemasan	32,250,000.00	67,750,000.00	0.00	100,000,000.00	32,250,000.00	67,750,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
01	16	13									
	Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Pelaku Usaha Tembakau Iris Sigaret (TIS) (DBH CT)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	134,424,400.00	170,000,000.00	324,924,400.00	324,924,400.00	0.00
	Jumlah Belanja Langsung	283,825,000.00	1,118,077,500.00	44,087,500.00	1,445,990,000.00	289,600,000.00	1,576,726,900.00	280,587,500.00	2,145,914,400.00	699,924,400.00	48.40



Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUHTAR SOLEH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2010

KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2010

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6
1 20	Pemerintahan Umum	105,773,954,868.00	25,424,030,000.00	80,349,924,868.00	80,349,924,868.00
1 20 03	Sekretariat Daerah	105,773,954,868.00	25,424,030,000.00	80,349,924,868.00	80,349,924,868.00

Diundangkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010




Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 15 Oktober 2010
 BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN				BELANJA							
		sebelum perubahan	setelah perubahan	bertambah/(berkurang)		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/(Berkurang)	
				Rp	Rp	Rp	%	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	TIDAK LANGSUNG		
		1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12 = 10+11
	URUSAN PILIHAN	4,536,291,651.05	4,541,852,913.55	5,561,262.50	0.12	24,393,780,400.00	16,209,407,600.00	40,603,188,000.00	24,255,028,700.00	18,524,478,887.00	42,779,507,587.00	2,176,319,587.00	
01	Pertanian	263,088,787.50	289,398,000.00	26,309,212.50	10.00	10,358,238,300.00	8,254,170,600.00	18,612,408,900.00	10,205,200,100.00	8,715,870,600.00	18,921,070,700.00	308,661,800.00	1.66
01 01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	263,088,787.50	289,398,000.00	26,309,212.50	10.00	10,358,238,300.00	8,254,170,600.00	18,612,408,900.00	10,205,200,100.00	8,715,870,600.00	18,921,070,700.00	308,661,800.00	1.66
02	Kehutanan	799,123,787.50	877,123,787.50	78,000,000.00	9.76	4,750,495,000.00	1,102,863,000.00	5,853,358,000.00	4,783,452,200.00	1,852,863,000.00	6,636,315,200.00	782,957,200.00	13.38
02 01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	799,123,787.50	877,123,787.50	78,000,000.00	9.76	4,750,495,000.00	1,102,863,000.00	5,853,358,000.00	4,783,452,200.00	1,852,863,000.00	6,636,315,200.00	782,957,200.00	13.38
04	Kebudayaan	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	0.00	0.00	1,556,752,900.00	1,377,521,000.00	2,934,273,900.00	1,623,896,800.00	1,328,735,500.00	2,952,632,300.00	18,358,400.00	0.63
04 01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	0.00	0.00	1,556,752,900.00	1,377,521,000.00	2,934,273,900.00	1,623,896,800.00	1,328,735,500.00	2,952,632,300.00	18,358,400.00	0.63
05	Kelautan dan Perikanan	513,820,126.05	513,820,126.05	0.00	0.00	4,834,819,400.00	4,028,863,000.00	8,863,682,400.00	4,791,796,400.00	4,481,095,387.00	9,272,891,787.00	409,209,387.00	4.62
05 01	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	513,820,126.05	513,820,126.05	0.00	0.00	4,834,819,400.00	4,028,863,000.00	8,863,682,400.00	4,791,796,400.00	4,481,095,387.00	9,272,891,787.00	409,209,387.00	4.62
07	Industri	1,510,258,950.00	1,411,511,000.00	(98,747,950.00)	(6.54)	2,893,474,800.00	1,445,990,000.00	4,339,464,800.00	2,850,683,200.00	2,145,914,400.00	4,996,597,600.00	657,132,800.00	15.14
07 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,510,258,950.00	1,411,511,000.00	(98,747,950.00)	(6.54)	2,893,474,800.00	1,445,990,000.00	4,339,464,800.00	2,850,683,200.00	2,145,914,400.00	4,996,597,600.00	657,132,800.00	15.14
	JUMLAH	1,444,961,743,578.02	1,467,211,262,625.74	22,249,519,047.72	1.54	1,079,511,358,608.02	439,940,036,247.00	1,519,451,394,855.02	1,008,931,475,229.74	538,629,712,264.00	1,547,561,187,493.74	28,109,792,638.72	1.85
	SURPLUS / (DEFISIT)							74,489,651,277.00			80,349,924,868.00		

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 16 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
NIP. 19571014 198503 1004

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Oktober 2010
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,

TJETJEP MUCHTAR SOLEH